



PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS 1B

RENCANA AKSI 2025



PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB

Jl. letnan Boyak No 77 Kota Bangkinang

Bangkinang 28412 Kab. Kampar Propinsi Riau Telp./Fax. (0762) 20043

email: pn_bkn@yahoo.com website: pn-bangkinang.go.id

RENCANA AKSI TAHUN 2025

Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB



Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB

Jl. Letnan Boyak No. 77 Bangkinang 28412 Kab. Kampar Prop. Riau

Telp/Fax. (0762)20043 email: pn_bkn@yahoo.com

website: pn-bangkinang.go.id

RENCANA AKSI TAHUN 2025
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB

NO	SASARAN KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET PER TRIWULAN			
			I	II	III	IV
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	80%	80%	80%	80%
		b. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	90%	90%	90%	90%
		c. Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	0%	0%	0%	0%
		d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90%	90%	90%	90%
		e. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90%	90%	90%	90%
		f. Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	0%	0%	0%	0%
		g. Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	97%	97%	97%	97%

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (RP)
		I	II	III	IV				
1.a	– Rapat Monev EIS-SIPP – Rapat Tim Satgas SIPP – Rapat Monev Kinerja – Pelaksanaan Persidangan sesuai SOP, berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan – Mengusulkan Diklat Hakim untuk peningkatan kualitas putusan – Pemenuhan sarana dan prasarana persidangan online – Mengupayakan persidangan melalui ecourt dan elitigasi	√	√	√	√	Peningkatan Penyelesaian Perkara Perdata Tepat Waktu	– Program Dukungan Manajemen dan – Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1049.AEA.001 Percepatan Penyelesaian Perkara	237,500,000
1.b	– Rapat Monev EIS-SIPP – Rapat Tim Satgas SIPP – Rapat Monev Kinerja – Pelaksanaan Persidangan sesuai SOP, berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan – Mengusulkan Diklat Hakim untuk peningkatan kualitas putusan – Pemenuhan sarana dan prasarana persidangan online – Implementasi Aplikasi E-berpadu	√	√	√	√	Peningkatan Penyelesaian Perkara Pidana Tepat Waktu	– Program Dukungan Manajemen dan – Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1049.AEA.001 Percepatan Penyelesaian Perkara	237,500,000
1.c	– Mengusulkan Diklat Hakim Mediator, SPPA, Diklat restorative Justice (RJ)	√	√	√	√	Hakim memiliki sertifikat hakim mediator, SPPA sehingga	– Program Dukungan Manajemen dan	1049.BCA.U03 Perkara Pidana yang Diselesaikan	237,500,000

						meningkatkan putusan dengan pendekatan RJ	– Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Ditingkat Pertama di wilayah Barat	
1.d	– Pelaksanaan Persidangan sesuai SOP, berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan – Mengusulkan Diklat Hakim untuk peningkatan kualitas putusan – Pemenuhan sarana dan prasarana persidangan online	√ √ √	√	√	√	Peningkatan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	– Program Dukungan Manajemen dan – Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1049.BCA.U03 Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di wilayah Barat	237,500,000
1.e	– Pelaksanaan Persidangan sesuai SOP, berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan – Mengusulkan Diklat Hakim untuk peningkatan kualitas putusan – Pemenuhan sarana dan prasarana persidangan online	√ √ √	√	√	√	Peningkatan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	– Program Dukungan Manajemen dan – Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1049.BCA.U03 Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di wilayah Barat	237,500,000
1.f	– Mengusulkan Diklat Hakim Mediator, SPPA, Diklat restorative Justice (RJ)	√	√	√	√	Peningkatan Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	– Program Dukungan Manajemen dan – Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1049.BCA.U03 Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di wilayah Barat	237,500,000

1.g	– Peningkatan pelayanan PTSP melalui pembinaan dan monev secara berkala – Pemenuhan saranan dan prasarana loby PTSP dan ruang tunggu persidangan – Melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, serta Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) – Melaksanakan survei SKM dan SPAK per triwulan dan melaksanakan rapat tindak lanjut survei	√	√	√	√	Mewujudkan Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	– Program Dukungan Manajemen dan – Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1049.AEA.001 Percepatan Penyelesaian Perkara	237,500,000
-----	--	---	---	---	---	--	--	--	-------------

NO	SASARAN KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET PER TRIWULAN			
			I	II	III	IV
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%
		c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	4%	4%	4%	4%

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (RP)
		I	II	III	IV				
2.a	– Rapat Monev EIS-SIPP	√	√	√	√	Seluruh Salinan	– Program Dukungan	1049.AEA.001	187,864,000

	- Rapat Tim Satgas SIPP - Rapat Monev Kinerja - Rapat Monev Delegasi - Pelaksanaan Persidangan sesuai SOP, berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan	√	√	√	√	Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	- Manajemen dan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Percepatan Penyelesaian Perkara	
2.b	- Rapat Monev EIS-SIPP - Rapat Tim Satgas SIPP - Rapat Monev Kinerja - Rapat Monev Aplikasi E-Berpadu - Pelaksanaan Persidangan sesuai SOP, berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan	√	√	√	√	Seluruh Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	- Program Dukungan Manajemen dan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1049.AEA.001 Percepatan Penyelesaian Perkara	187,864,000
2.c	- Mengusulkan Diklat Hakim Mediator, Diklat restorative Justice (RJ)	√				Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	- Program Dukungan Manajemen dan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1049.BCA.U03 Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di wilayah Barat	187,864,000

NO	SASARAN KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET PER TRIWULAN			
			I	II	III	IV
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan (Tidak ditetapkan karena tidak ada anggaran dalam DIPA tahun 2022)	100%	100%	100%	100%

		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan (Tidak ditetapkan Karena Tidak ada Anggaran Prodeo dalam DIPA Dirjen Badilum pada Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB)	-	-	-	-
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (RP)
		I	II	III	IV				
3.a	– Lelang Petugas Posbakum – Pembinaan petugas posbakum oleh Panitera dan Panmud Hukum – Rapat Monev Posbakum – Pelaksanaan Realisasi Anggaran Posbakum tepat waktu – Pemenuhan sarana dan prasarana Ruang Posbakum – Sosialisasi Posbakum menggunakan sosial media dan website	√				Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	– Program Dukungan Manajemen dan – Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1049.QBA.032 Pos Bantuan Hukum	36.000.000
		√	√	√	√				

NO	SASARAN KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET PER TRIWULAN			
			I	II	III	IV
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	20%	20%	20%	20%

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (RP)
		I	II	III	IV				
4.	– Rapat Monev Eksekusi – Melaksanakan eksekusi – Rapat Koordinasi dengan pihak eksternal terkait pengamanan eksekusi – Membuat laporan eksekusi secara berkala	√	√	√	√	Peningkatan Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	– Program Dukungan Manajemen dan – Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-	Ditanggung oleh Pihak Berperkara

Bangkinang, 14 Januari 2025

Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB,

SONI NUGRAHA, S.H., M.H.

NIP. 19790409 200212 1 002